



Nama Formulir:

**Lembar
Pengesahan
Karya Ilmiah**

No.

FR-003/PR-003/KB-02-
01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

-

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Mohammad Syaban, MA
Jabatan Dosen
Program Studi Hubungan Internasional
NIP _____

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

Peran Indonesia dalam Membantu Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap Nabilla Ainiyah
Jenjang S1
Program Studi Hubungan Internasional
NIM 117105012

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 26 September 2021

Penelaah,

Mohammad Syaban, MA

NIP: _____

Nama Formulir:

**Surat Pernyataan
dan Validasi**

No.

FR-002/PR-003/KB-02-
01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

-

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Nabilla Ainiyah
Jenjang S1
Program Studi Hubungan Internasional
NIM 117105012
Alamat Villa Nusa Indah 2 Blok W23/14 Jalan Badminton IV Bojong Kulur,
Gunung Putri, Bogor

** coret yang tidak perlu*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

Peran Indonesia dalam Membantu Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 26 September 2021

Yang membuat Pernyataan,



Nama Lengkap: Nabilla Ainiyah
NIM : 117105012



Nama Formulir:
**Lembar
Pengesahan
Karya Ilmiah**

No.	FR-003/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020
Issue/Revisi	1
Tgl Berlaku	-
Halaman	1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Mahammad Syaban, MA
Jabatan Dosen
Program Studi HI
NIP 221090381

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

Peran Indonesia Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap Debora Neria Chamima
Jenjang SI
Program Studi Hubungan Internasional
NIM 117105028

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 01 Oktober 2021

Penelaah, Am

NIP: 221090381

Nama Formulir:

No.

FR-002/PR-003/KB-02-
01/MMP/UPM/2020

**Surat Pernyataan
dan Validasi**

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

-

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Debora Neria Chamima
Jenjang S1
Program Studi Hubungan Internasional
NIM 117105028
Alamat Jl. Budaya no. 62 D, Condet, Jakarta Timur 13520

* coret yang tidak perlu

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

Peran Indonesia Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta,

Yang membuat Pernyataan,



Nama Lengkap: Debora Neria Chamima
NIM : 117105028

PERAN INDONESIA DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS ROHINGYA

Nabilla Ainiyah 117105012

Debora Neria 117105028

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Paramadina
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta

ABSTRAK

Rohingya, sebagai etnis minoritas dengan latar belakang perbedaan agama dan ras, telah diperlakukan diskriminatif di Myanmar. Selama bertahun-tahun, mayoritas masyarakat Myanmar yang beragama Buddha, yakni etnis Rakhine beserta militer Myanmar telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap etnis ini. Sehingga perlakuan ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan di Myanmar lebih dari sewindu. Berawal dari Mei 2012 adanya konflik terbuka antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine menjadi perhatian masyarakat internasional, khususnya Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim sekaligus anggota dan pemimpin *de facto* ASEAN di mana Myanmar juga menjadi anggota organisasi regional ini. Melihat krisis kemanusiaan di Myanmar, Indonesia berusaha membantu menyelesaikan konflik antara etnis Rohingya dan Rakhine. Penelitian ini menggunakan asumsi liberalisme diperkuat menggunakan Teori Peran dan Konsep Diplomasi sebagai alat analisis. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa agama berperan dalam mempengaruhi konflik Rohingya yang juga disebabkan kepercayaan terhadap norma dan nilai keislaman yang dipegang oleh mayoritas warga negara Indonesia. Dalam membantu korban dan usaha penyelesaian konflik, Pemerintah Indonesia mengupayakan pemberian bantuan berupa diplomasi terbuka dengan Myanmar, solidaritas agama bersama negara-negara Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI), pemberian bantuan hibah untuk pemulangan pengungsi melalui ASEAN dan bantuan kemanusiaan berupa sarana prasarana dan yang sifatnya darurat. Selain itu penelitian ini mendapatkan bahwa bantuan kemanusiaan dan jalur diplomasi digunakan oleh Indonesia untuk membantu menyelesaikan konflik antar etnis Rohingya dan Rakhine.

Kata Kunci: Rohingya, Konflik, Peran Indonesia

1. PENDAHULUAN

Myanmar adalah negara yang mempunyai keberagaman etnis yang mirip dengan Indonesia. Akan tetapi, keberagaman yang terdapat di negara Myanmar lebih menimbulkan beragam konflik yang disebabkan oleh tidak terkontrolnya berbagai perbedaan antar etnis. Konflik yang terjadi di Myanmar Barat tepatnya di provinsi Arakan telah membuat dua kelompok etnis terlibat dalam suatu konflik. Kedua etnis yang dimaksud yakni Suku Rohingya dan Rakhine yang telah terjadi dalam waktu lama. Alasan ketegangan tersebut di antara keduanya adalah adanya anggapan banyak masyarakat di Myanmar bahwa Rohingya adalah sekumpulan pemukim yang secara tidak sah mendiami wilayah Myanmar. Mereka merupakan pengungsi yang berasal dari Bangladesh. Puncaknya adalah seperti yang diberitakan oleh berbagai media internasional bahwa konflik tersebut terjadi semenjak tahun 2012 ketika disebabkan kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang gadis Rakhine yang diklaim dilakukan oleh tiga pemuda Rohingya. Rasa balas dendam kemudian muncul dari pihak etnis Rakhine. Akibatnya, terdapat banyak rumah milik etnis Rohingya yang dibakar. Ketiadaan upaya untuk menyelesaikan konflik ini dari pihak aparat keamanan

setempat yang bertugas semakin memperkeruh ketegangan tersebut (Mitzy, 2014).

Akar ketegangan yang memicu konflik antar etnis tersebut juga mencapai klimaks pasca peristiwa pemerkosaan karena ada rasa cemburu pada etnis Rohingya. Kecemburuan tersebut disebabkan oleh peningkatan populasi etnis muslim Rohingya selama beberapa dasawarsa terakhir. Hal tersebut memicu ketidaksukaan dari pihak etnis Rakhine. Dari perspektif etnis mayoritas, keberadaan pengungsi ilegal dari Bangladesh tersebut merupakan hal yang mengganggu. Dengan keberadaan etnis Rohingya di Myanmar, hak atas ekonomi dan lahan etnis mayoritas menjadi berkurang, terutama di daerah Arakan yang menjadi lokasi tempat tinggal etnis Rakhine sekaligus Rohingya.

Pergolakan yang terjadi pada etnis Rohingya tahun 2012 saat pergantian kepemimpinan pemerintahan Myanmar bukan merupakan sesuatu yang positif bagi etnis Rohingya namun justru semakin memburuk. Konflik fisik justru terjadi antara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya. Setidaknya hampir 100 orang terbunuh baik dari etnis Rakhine maupun kaum Muslim Rohingya. Pemerintahan Myanmar yang saat itu dipimpin oleh Presiden Thein Sein memberikan pernyataan kepada masyarakat

internasional bahwa Myanmar berstatus negara darurat. Hal ini yang mendorong pada akhirnya berbagai negara memberikan bantuan seperti Indonesia yang mencoba mendamaikan pertikaian antara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya.

Dalam menanggapi kasus ini, pemerintah Myanmar sendiri tidak menunjukkan responsnya dengan semestinya. Sejauh ini, tidak ada upaya berarti yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal tersebut terlihat dari cara pemerintah berusaha untuk menyembunyikan konflik etnis yang terjadi serta tidak membebaskan akses untuk bisa memasuki daerah Arakan yang menjadi pusat pertikaian kedua etnis. Akibatnya, bantuan dari luar juga mengalami kesulitan ketika mencoba mengakses daerah tersebut. Selain itu, pengabaian juga terlihat dalam ketiadaan upaya pemerintah untuk melakukan sesuatu. Pemerintah Myanmar cenderung diam tanpa berusaha menghentikan maupun meredam konflik (Bangun, 2012). Pengabaian yang dilakukan oleh Myanmar yang paling disoroti adalah penolakan bantuan dari luar. Myanmar beralasan bahwa penolakan tersebut untuk keamanan juga mencegah masuknya bantuan untuk pihak teroris. Myanmar mengatakan bahwa pertolongan yang diberikan oleh pihak luar bagi

penduduk etnis Muslim dapat menyusahakan pemerintahan dalam membasmi teroris. Myanmar menolak laporan tentang keadaan Rohingya. Berbagai konflik bersenjata yang terjadi malah menyebabkan Myanmar juga melakukan penutupan, penolakan dan juga menghambat berbagai bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan penduduk Rohingnya yang menduduki wilayah Myanmar. Pemblokiran akses tak hanya dilakukan terhadap bantuan yang diberikan oleh berbagai negara luar, namun pemblokiran juga dilakukan terhadap bantuan yang berasal dari lembaga-lembaga resmi dunia, seperti dari *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR) dan *World Food Program* (WFP). Myanmar juga mengabaikan kesehatan para penduduk Rohingnya yang masih tinggal di wilayahnya. Selain menolak untuk diberikan bantuan terkait sandang dan pangan, Myanmar juga menolak bantuan terkait kesehatan. Bantuan tenaga medis yang sudah disiapkan oleh berbagai negara dalam rangka bantuan kemanusiaan juga dipersulit untuk masuk ke Myanmar (Fransiska Ayulistya Susanto, 2020). Selain itu, pemerintah Myanmar juga mengabaikan hak kewarganegaraan penduduk Rohingnya dengan tidak memberi pengakuan kewarganegaraan bagi penduduk Rohingnya yang sudah menduduki dalam beberapa

generasi di Myanmar. Pemerintah Myanmar menganggap penduduk Rohingnya adalah para pendatang Bangladesh yang ilegal, maka dari itu mereka tidak patut diakui sebagai WN Myanmar (Kurniawan, 2017).

Sebagai salah satu negara yang berada di kawasan yang sama dengan Myanmar (ASEAN), hal ini membuat pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam memberikan bantuan serta mengupayakan solusi terhadap penyelesaian konflik ini. Terlebih Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar, akan menimbulkan keterikatan secara emosional dengan Etnis Rohingnya karena menganut agama yang sama. Indonesia terus berusaha membantu dalam upaya penyelesaian kasus Rohingnya dengan solidaritas keagamaan. Indonesia mengupayakan diplomasi secara terbuka dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indonesia telah melakukan lobi-lobi dengan negara anggota OKI agar dapat mencapai tujuan dalam mendapatkan dukungan yang semakin banyak dan kuat dari negara-negara OKI dalam menyelesaikan konflik Rohingnya. Selain itu, Indonesia juga melakukan komunikasi intensif kepada perwakilan negara Republik Indonesia yang berada di negara anggota OKI untuk dapat mengetahui sikap OKI yang tetap memperhatikan atas penanganan konflik

Rohingnya. Lebih jauh lagi, pada bulan September 2017, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri pertemuan di markas PBB, New York dalam pembahasan Formula 4+1. Dalam pidatonya, Jusuf Kalla menyampaikan isi formula dalam rangka memberikan bantuan kepada penduduk Rohingnya serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Myanmar. Usulan tersebut terkait tentang menstabilkan keamanan, tidak menggunakan kekerasan, melindungi semua orang di Rakhine serta mengusulkan pembukaan akses bantuan kemanusiaan (Taufiqurrahman, 2017).

Hal ini membuat pemerintah Indonesia tidak berdiam diri melihat konflik ini. Sesuai dengan penjelasan di atas, Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah; (1) Bagaimanakah pengaruh agama terhadap peranan Indonesia terkait konflik Rohingnya? (2) Apa upaya Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar?

2. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Peran

Teori yang merupakan turunan dari paradigma liberal ini beranggapan bahwa peran negara bisa memberikan bantuan untuk membuat gambaran tugas sebuah

negara serta memberi landasan dalam setiap tindakan saat negara tersebut telah melakukan pengidentifikasian peran nasional. KJ Holsti dalam bukunya yang dialihbahasakan oleh Wawan Juanda memberikan pernyataan bahwa peran nasional memberi gambaran terkait tugas dan fungsi sebuah negara di beragam konteks global yang berbeda. Artinya, peran nasional memberi petunjuk dalam melaksanakan tindakan pada suatu kondisi yang ada di kancah internasional.

Peran nasional bisa terlihat menyerupai kebijakan luar negeri sebuah negara ketika negara tersebut terlibat pada sebuah permasalahan internasional ataupun regional. Tidak hanya itu, peran nasional juga mempunyai berbagai karakteristik yang menuju ke arah aktualisasi yang lebih nyata. Contohnya, saat sebuah negara menjalankan perannya sebagai mediator integrator, maka negara tersebut bisa diprediksikan akan memberikan kesediaannya dalam membantu menyelesaikan permasalahan sekaligus melakukan berbagai usaha diplomatik apabila muncul sebuah konflik (Holsti (. K., 1987).

Peran nasional memiliki kaitan erat dengan kondisi eksternal negara, sikap masyarakat, serta kebutuhan domestiknya.

Tidak hanya itu, peran nasional sebuah negara bisa diketahui dari tujuan negara membantu menyelesaikan konflik negara lain. Dengan memediasi konflik Rohingya, Indonesia hendak meningkatkan prestis sebagai negara yang dianggap bisa melakukan mediasi, mendamaikan, serta menyelesaikan pertikaian yang terjadi di negara lainnya (Holsti K. , 1970).

Terkait peran ini, dalam konteks hubungan negara, kesamaan agama menjadi salah satu pendorong bagaimana peran suatu negara dalam membantu negara lain yang memiliki kesamaan ideologi agama. Dalam hal ini, Mark Webber dan Michael Smith memberikan pendapat yang mengatakan bahwa aktor-aktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri serta besarnya pengaruh aktor tersebut sangat bergantung pada isu yang diamati dan sistem politik domestik negara bersangkutan. Dalam pemahaman bagaimana agama dapat memainkan peranan penting dalam hubungan internasional, maka Jonathan Fox dan Schmucl Sandler memiliki gagasan tentang diadopsi sebagai pisau bedah teoritik. Mereka menjabarkan bahwa agama memiliki pengaruh dan memainkan peranannya melalui empat sisi, antara lain; *Religion is one of the sources of people's*

worldviews; religion is a source of identity; religion is a source of legitimacy; religion is associated with formal institution. Demi koherensi dan konstruksi agar mudah dipahami, paper ini akan disajikan dengan memusatkan pembahasan pada; pertama, latar belakang dan sejarah konflik di Rakhine, Myanmar; kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap identitas Indonesia dan reaksi masyarakat Indonesia terhadap konflik di Rakhine dengan memusatkan perhatian pada komposisi masyarakat berdasarkan agama; selanjutnya, penjabaran tindakan-tindakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik etnis di Rakhine, Myanmar (Satria, 2014).

2.2 Diplomasi

Sesuai dengan penjabaran sebelumnya pada bagian teori peran bahwa peran nasional memberi petunjuk dalam pengambilan tindakan saat kondisi tertentu terjadi di kancah global. Dengan demikian, usai melakukan identifikasi diri sebagai mediator integrator, Indonesia berupaya memberi solusi untuk menyelesaikan konflik etnis di Myanmar dengan memakai beragam usaha diplomasi, termasuk dalam bentuk pemberian bantuan kemanusiaan.

Di lingkup hubungan internasional, diplomasi disebut-sebut merupakan metode

untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai demi tercapainya kepentingan nasional. Hal ini berkesesuaian dengan penjabaran Louise Diamond yang menyebutkan bahwa diplomasi adalah sebuah proses politik yang damai antar negara yang hendak membangun, membentuk, serta mengelola sistem hubungan Internasional demi menjaga kepentingan nasionalnya (Diamond & McDonald, 1996).

Banyaknya pandangan mengenai arti diplomasi yang berlainan, tidak membuat definisi seluruhnya memiliki perbedaan signifikan. Hampir semuanya justru mempunyai makna yang serupa dan membuat penulis melakukan penarikan kesimpulan bahwa pada hakikatnya, diplomasi dapat dianggap sebagai sebuah praktik, cara, ataupun seni dalam melakukan negosiasi yang diperankan oleh seorang diplomat yang menjadi perwakilan bagi kepentingan negara. Dengan demikian, diplomasi mempunyai tujuan yakni guna mendahulukan kepentingan negara termasuk demi mendorong kemajuan perekonomian, melakukan pengembangan ideologi dan budaya, bersahabat, serta mendorong peningkatan prestis nasional (Roy, 1991).

Dalam pengaplikasiannya, konsep diplomasi terjadi ketika pemerintah

mengambil tindakan penuh dalam menjalankan mediasi sebagai pihak ketiga. Selanjutnya, konsep diplomasi tersebut diharap bisa menguraikan beragam usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik Rohingya termasuk di tingkatan multilateral maupun bilateral.

Menggunakan teori peran dan diplomasi, tulisan ini menjelaskan tentang peran yang diambil Indonesia termasuk aspek solidaritas agama berkontribusi pada proses penyelesaian konflik di Rohingya serta strategi diplomasi yang diaplikasikan Indonesia untuk membantuk korban konflik Rohingnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai yakni metode deskriptif, yang memberikan penjabaran ataupun gambaran suatu proses permasalahan yang muncul. Pendeskripsian dilakukan tidak hanya dengan menguraikan fakta, tapi juga menjabarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di sini penulis mendeskripsikan bagaimana awal mula konflik Rohingya memanas serta mendeskripsikan peran Indonesia dalam membantu menangani konflik etnis rohingya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mempunyai tujuan untuk melakukan pendeskripsian secara akurat, faktual, dan sistematis terkait berbagai hubungan dan

fakta antar fenomena yang diteliti dengan mencari fakta dengan interpretasi yang sesuai. Data-data dalam penelitian sangat berguna dalam pembuktian dari sebuah hipotesa dan pencarian jawaban. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan, dengan memanfaatkan buku, jurnal, dan dokumen-dokumen laporan resmi lembaga terkait dari berbagai media seperti internet ataupun *e-book*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Solidaritas Keagamaan di Indonesia Berperan Pada Usaha Penyelesaian Konflik Rohingnya

Agama turut memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam berbagai isu tertentu termasuk beragam isu eksternal yang berkaitan dengan keislaman, khususnya yang melakukan mendiskreditkan entitas dan nilai yang berkaitan dengan Islam. Norma dan nilai keislaman yang dipegang oleh mayoritas warga negara Indonesia menarik garis persepsi atas kenyataan yang terjadi. Berkenaan dengan isu-isu yang dijabarkan sebelumnya, rakyat memiliki kecenderungan bersikap reaktif yang berakibat pada transformasi persepsi individu ke dalam persepsi kolektif. Hal ini diakibatkan oleh identitas yang sama yakni agama yang kemudian menimbulkan munculnya desakan

pada pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pengambilan sikap yang tegas dan konkret (Santayabudi, 2018). Bagaimanapun juga, demokratisasi di Indonesia setelah pergantian rezim di tahun 1998 berpengaruh secara signifikan. Demokratisasi tersebut memungkinkan partisipasi publik, opini, dan media memengaruhi proses perumusan kebijakan.

Di Indonesia, konten media massa yang mayoritas mirip satu sama lain baik media lokal maupun nasional, elektronik dan cetak, berkenaan dengan konflik etnis Rohingya ditambah dengan tingginya intensitas pemberitaan membuatnya menjadi salah satu penyebab dan asal mula persepsi publik. Media merupakan sumber informasi. Dengan demikian, pemakaian kalimat ataupun kata yang memiliki kecenderungan provokatif seperti ‘pembantaian umat muslim di Myanmar’ atau ‘genosida muslim’, yang mau tidak mau diterima oleh masyarakat Indonesia yang mayoritasnya memiliki agama yang sama, yakni Islam yang menganggapnya sebagai bentuk tindak kekerasan pada umat muslim. Hal ini kemudian bisa memicu penggiringan opini berkenaan dengan isu ini secara kolektif. Di sisi lain, berita terkait lambannya pemerintah Indonesia dalam menjadi perwakilan negara dengan jumlah penduduk muslim paling

besar di dunia (Satria & Jamaan, Jurnal Transnasional Vol. 5 No. 1 Juli 20, 2013). Akibatnya, masyarakat Indonesia terdorong untuk memberikan desakan pada pemerintah agar segera mengambil tindakan yang berkesesuaian dengan identitasnya sebagai negara Islam terbesar.

Fakta bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim yang besar, maka reaksi sebagian besar penduduk Indonesia yang menampakkan simpatinya atas kejadian yang menimpa saudara muslim etni Rohingya merupakan hal yang tak terelakkan (Triono, 2014). Perasaan simpati yang besar tersebut selanjutnya diperlihatkan dengan menjamurnya aksi demonstrasi dan solidaritas yang terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia. Tuntutan yang diajukan serupa, yaitu mendesak pemerintah Indonesia agar segera melakukan pengambilan langkah yang efektif demi melakukan penyelesaian konflik dan memberikan perlindungan pada etnis muslim Rohingya.

Solidaritas Indonesia dalam misi penyelesaian konflik Rohingya ini disampaikan pada pertemuan dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya Organisasi Kerja Sama Islam untuk membantu pembangunan inklusif di

Rakhine, Myanmar, sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik Rohingya. Menteri Luar Negeri Indonesia menggelar pertemuan di Malaysia dengan Menteri OKI yang diagendakan untuk menyampaikan dorongan Indonesia agar memulai koordinasi dengan ASEAN dalam membantu Myanmar dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi terkait masalah kemanusiaan. Keamanan di Rakhine serta etnis Rohingya yang menduduki di sana menjadi agenda utama pada pertemuan OKI saat ini. Berkat keaktifan Indonesia dalam upaya membantu penyelesaian masalah kemanusiaan di Myanmar ini, kemampuan diplomasi Indonesia diakui negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) (Suastha, 2017).

b. Bantuan Kemanusiaan dari Indonesia sebagai Strategi Diplomasi Penyelesaian Konflik

Pemerintah Indonesia dalam melakukan upayanya membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar yakni dalam bentuk Bantuan Kemanusiaan dan Upaya Diplomatik.

Secara berkala, Indonesia memberi bantuan kemanusiaan sebagai sumbangsih terhadap konflik ini. Sumbangsih yang berwujud bantuan kemanusiaan yang diberi

Indonesia memiliki sifat darurat seperti halnya sebuah tenda, Bantuan lain yang diberi oleh pemerintah Indonesia yakni berupa sarana prasarana. Bantuan-bantuan tersebut sifatnya inklusif. Maksudnya, berbagai sarana prasarana yang diberi tidak hanya digunakan oleh etnis Rohingya melainkan juga digunakan juga oleh masyarakat etnis Rakhine. Sarana prasarana yang dibangun diantaranya yakni:

- Memberi bantuan konseling untuk para pengungsi Rohingya. Bantuan tersebut diberi oleh relawan Indonesia lewat Aksi Cepat Tanggap. Konseling dirasa dibutuhkan oleh korban sebab mereka sudah mengalami *post-traumalogy* akibat tindak kekerasan yang mereka dapatkan.
- Memberi bantuan makanan ke Myanmar yakni sebesar 20 ton di tanggal 22 September 2017. Bantuan kemanusiaan ini berbentuk makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, tangki air, makanan siap saji, obat-obatan, serta tenda. Semuanya dikirim memakai dua pesawat Hercules.
- Memberi paket bantuan lewat AKIM sebesar 10 kontainer bagi warga Rohingya yang tinggal di Rakhine

pada 2016.

- Membangun rumah sakit dan sekolah (Azizah, 2017).

Dalam upaya Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik di Myanmar, pemerintah Indonesia juga melaksanakan tindakan diplomatik bersama pemerintah Myanmar. Pemerintah Indonesia yang diwakili Menlu Retno Marsudi, dalam kunjungan diplomat ke Myanmar juga diikuti oleh penyelenggaraan dialog bersama penasihat Pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi. Dalam dialog tersebut Menlu RI kepada Suu Kyi mengutarakan amanat masyarakat Indonesia yang diusul dengan empat usulan solusi atau disebut juga dengan formula 4+1 demi masa depan etnis Rohingya yaitu dengan melakukan pengembalian keamanan dan stabilitas, penahanan diri secara optimal serta untuk tidak melibatkan kekerasan, melindungi semua warga yang ada di Rakhine tanpa melihat agama dan suku mereka, serta pentingnya pembukaan akses bantuan Ronghiya. Dalam dialog tersebut juga berhasil membuka akses bantuan bagi warga Ronghiya (Rosyid, 2018).

Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Jokowi menghadiri pertemuan KTT ASEAN ke-34 di Bangkok pada bulan Juni 2019. Pembahasan pada pertemuan tersebut

menyoroti terkait aksi pemulangan pengungsi. Jokowi memberikan peringatan pada Pemimpin ASEAN sudah memberikan perintah untuk AHA Centre agar segera melakukan '*Needs Assesment*' yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada Myanmar dalam menyiapkan repatriasi yang aman. Perintah tersebut telah dilaksanakan dengan melakukan *Preliminary Needs Assessment* (PNA) tim kepada Rakhine State. Laporan terkait hal tersebut juga sudah dilaksanakan. Jokowi menyarankan untuk melakukan tindak lanjut rekomendasi laporan PNA. Indonesia memiliki sebuah harapan agar Pemerintah Myanmar dan juga aparat Myanmar dapat mewujudkan sebuah pemulihan keamanan. Presiden Jokowi menyampaikan saran kepada ASEAN untuk dapat memberikan bantuan dalam berkomunikasi dengan Bangladesh serta pengungsi di Cox's Bazar. Komitmen yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi tersebut kemudian dilaksanakan Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri RI. Pada bulan Desember 2019, Kementerian Luar Negeri RI telah melaksanakan pemberian tandatangan pada perjanjian hibah yang dilakukan antara pemerintah RI dan ASEAN. Kesepakatan tersebut merupakan sebuah bentuk implementasi yang real terkait

repatriasi. Selebihnya, Pemerintah RI dengan ASEAN juga melakukan penandatanganan dokumen yang berisi terkait bantuan anggaran yang berasal dari RI sejumlah Rp 7,5 Milyar dengan perantara sekretariat ASEAN. Hal tersebut merupakan salah satu upaya Indonesia dalam rangka melaksanakan dari penyaluran dana bagi *development cooperation*. Dana kesepakatan hibah tersebut akan digunakan dalam rangka melancarkan kegiatan politik luar negeri oleh Indonesia, sekaligus agar dapat berpartisipasi lebih untuk dunia, terutama terkait dengan perdamaian dan kemanusiaan, salah satunya isu konflik Rohingya (Kemlu, 2019).

Usaha yang dilakukan dianggap sebagai langkah tepat yang bisa dilaksanakan pemerintah Indonesia lewat jalur diplomatik bilateral dengan damai. Setelah dialog tersebut, Myanmar diharap bisa membuka diri dan menunjukkan pertanggungjawabannya untuk memberikan perlindungan pada tiap warga negara tanpa melihat perbedaan etnis masyarakat.

5. KESIMPULAN

Dominasi Muslim yang jumlahnya besar di Indonesia memicu terbentuknya salah satu identitas sosialnya, yaitu sebagai negara berpenduduk muslim paling besar di dunia. Agama berpengaruh terhadap berbagai isu politik luar negeri Indonesia berkenaan

dengan suatu isu. Beragam isu eksternal yang berkaitan dengan keislaman, khususnya mendiskreditkan entitas ataupun nilai yang berhubungan dengannya. Hal tersebut mungkin terjadi disebabkan oleh norma dan nilai keislaman yang dipegang oleh mayoritas warga negara Indonesia yang menarik garis persepsi mereka atas kenyataan yang terjadi. Berkenaan dengan isu konflik etnis Rohingya yang beragama muslim, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan menjadi reaktif. Hal ini mengkonvergensi dan menggiring persepsi individu menjadi persepsi kolektif yang berakibat pada munculnya desakan pada pemerintah Indonesia agar segera melakukan pengambilan tindakan yang tegas untuk mengatasi permasalahan ini.

Melihat adanya konflik di Myanmar Pemerintah Indonesia secara cepat melakukan pengupayaan dalam membantu menyelesaikan Konflik Etnis ini dengan memberi bantuan kemanusiaan berupa sarana prasarana dan yang sifatnya darurat. Bantuan kemanusiaan yang sifatnya darurat yakni berbentuk tenda. Bantuan kemanusiaan yang berbentuk sarana prasarana dengan melakukan pembangunan rumah sakit dan sekolah di Rakhine. Tidak hanya melakukan bantuan kemanusiaan, Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan

Myanmar serta memberi beragam solusi terkait permasalahan etnis Rohingya ini yakni dengan formula 4+1. Sikap Myanmar saat dialog kedua negara (Indonesia dan Myanmar) disambut baik dan negara tersebut menerima Indonesia untuk memperbincangkan permasalahan tersebut. Perkembangan berikutnya yakni Myanmar memberikan izin Indonesia untuk mengakses dan memberi bantuan kemanusiaan secara langsung di Rakhine. Selain itu, perkembangan solusi yang diusulkan oleh Indonesia pada Myanmar yakni negara tersebut sedang mengupayakan aktualisasi beragam solusi yang diusulkan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albayumi, F., Hadi, N. M., & Susilo, D. (2018). Nation State: Journal of International Studies. *Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Rohingya*.
- Azizah, I. N. (2017). Global Political Studies Journal. *Bantuan Indonesia dalam Penanganan Masalah Etnis Rohingya di Myanmar (2013-2017)*.
- Bangun, B. F. (2012). *Konflik Etnis Myanmar*.
- Diamond, L., & McDonald, J. (1996). *Multi-Track Diplomacy: A system approach to peace, third edition*. USA: Kumarian Press Inc.
- Fransiska Ayulistya Susanto, S. L. (2020). PENOLAKAN PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN DARI PBB OLEH MYANMAR DALAM PRESPEKTIF HUKUM. *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Holsti, (. K. (1987). *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta.
- Holsti, K. (1970). *National Role Conception in the study of Foreign Policy*. International Studies Quarterly.
- Kemlu. (2019). *Indonesia Berikan Bantuan Hibah Untuk Pemulangan Pengungsi Rakhine State*. Jakarta: Kemlu.
- Kurniawan, N. (2017). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4.
- Mitzy, G. I. (2014). Indonesian Journal of International Studies (IJIS). *Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif*.
- Nye, J. (2014). *Soft Power: The Means To Success In World Politics*. Jr. Public Affairs.
- Rosyid, M. (2018). Jurnal Hukum & Pembangunan. *PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI ETNIS MUSLIM ROHINGYA*.
- Roy, S. L. (1991). *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santayabudi, F. (2018). *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Memberikan Bantuan Pada Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar*.
- Satria, N., & Jamaan, A. (2013). Jurnal Transnasional Vol. 5 No. 1 Juli 20. *Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Indonesia dalam Konflik*.
- Taufiqurrahman, M. (2017). *Indonesia dan Negara OKI Berkumpul di PBB Bahas Rohingya*. New York: DetikCom.

Triono. (2014). Jurnal TAPIS. *Peran ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya.*